

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis, terdapat persaingan yang cukup ketat antar perusahaan manufaktur baik dalam meraih pangsa pasar yang luas maupun menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan PSAK no.1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Para pengguna laporan keuangan mempunyai kepentingan yang berbeda, yang biasanya dikelompokkan dalam kategori seperti investor, kreditor manajer, pembuat peraturan, perserikatan, dan pemerintah (kelompok-kelompok tersebut disebut *constituancies*). Dengan memahami masalah keputusan, akuntan perlu menyiapkan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai pengguna. Dengan menyesuaikan informasi laporan keuangan pada kebutuhan pengguna laporan keuangan tersebut akan mengarahkan pada pembuatan keputusan yang lebih baik. Dalam cara ini laporan keuangan dapat dikatakan akan lebih berguna (*usefull*).

Laba komersial ditujukan sebagai ukuran kinerja bisnis yang diperuntukkan kepentingan banyak pihak dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Laba fiskal sebagai dasar menentukan pajak yang harus dibayar ke negara dan disusun sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku menyebabkan terdapat perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Menurut Hadimukti (2012), masalah muncul ketika perusahaan memiliki laba akuntansi (*Book Income*) yang lebih besar dibandingkan laba fiskal (*Taxable Income*) pada sebuah laporan keuangan terutama perusahaan yang telah *go public* akan melakukan manajemen laba sebagai suatu kecurangan (*fraud*) yang memiliki kaitan dalam pembayaran pajak. Perusahaan yang memiliki laba akuntansi (*Book Income*) yang lebih besar dari laba fiskal (*Taxable Income*) kecenderungan mengelola laba menjadi tinggi agar terhindar dari pembayaran pajak yang besar.

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai “intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi” (Schipper, 1989 dalam Scott, 2003:92, dalam Hasni, dkk., 2013). Proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah dilaporan keuangan, yaitu laba. Banyak alasan manajer melakukan manajemen laba, termasuk meningkatkan kompensasi manajer yang terkait dengan laba yang dilaporkan, meningkatkan harga saham, dan

usaha untuk mendapatkan subsidi pemerintah (mengurangi pajak terutang). Terdapat 2 mekanisme manajemen laba yaitu pemindahan laba dan manajemen laba melalui klasifikasi. Pemindahan laba merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode lainnya. Pemindahan laba dapat dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Pada manajemen laba, laba juga dapat ditentukan secara khusus mengklasifikasi beban dan pendapatan pada bagian tertentu laporan laba rugi.

Salah satu teknik pengelolaan laba yang biasa digunakan manajemen adalah akrual. Akrual merupakan selisih antara kas masuk bersih dari hasil operasi perusahaan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan bisa bersifat *Discretionary Accrual & Non Discretionary Accrual* (tingkat akrual yang tidak normal). *Discretionary Accrual* merupakan komponen akrual yang memberikan keleluasaan pada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual yang fleksibel. *Non Discretionary Accrual* merupakan komponen akrual yang terjadi secara alami seiring dengan perubahan dari aktifitas perusahaan. Total akrual akan diregresikan dengan variabel-variabel yang mewakili akrual seperti penghasilan atau pendapatan dan aktiva tetap. Laporan keuangan disusun berdasarkan proses akrual, sehingga angka-angka laporan keuangan akan mengandung komponen akrual, baik yang diskresioner maupun yang bukan diskresioner. Menurut Bernard dan

Skinner (1996, dalam Djamaluddin, Rahmawati, dan Wijayanti 2007), penelitian-penelitian mengenai manajemen laba menunjukkan bahwa akrual diskresioner menyebabkan terjadi kesalahan dalam prediksi manajemen laba. Kesalahan tersebut disebabkan oleh kesalahan pengklasifikasian akrual total kedalam bentuk *discretionary accrual* dan *non-discretionary accrual*, sehingga penggunaan model akrual menjadi tidak tepat. Kesalahan dalam memprediksi ada tidaknya manajemen laba, menyebabkan kesalahan dalam menilai kualitas laba perusahaan sehingga menyebabkan bias dalam penilaian kinerja perusahaan. Phillips *et al.* (2003) berpendapat bahwa para manajer mempunyai banyak kebebasan dalam pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak, dan dapat memanfaatkan kebebasannya tersebut untuk menaikkan laba akuntansi dengan suatu cara tertentu tanpa menaikkan laba fiskal. Yulianti (2005) menemukan bahwa kedua pengukur manajemen laba (akrual dan beban pajak tangguhan) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian.

Aktivitas manajemen laba yang terdeteksi dalam *book-tax differences*, dapat dilakukan dengan menaikkan liabilitas pajak tangguhan bersih (yaitu liabilitas pajak tangguhan dikurangi aktiva pajak tangguhan bersih), dan mengakibatkan naiknya beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) (Djamaluddin dkk., 2007) . Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh

menurun dan aktiva pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang sehingga mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hasni, Yulia dan Haryani (2013), aktiva pajak tangguhan mempunyai pengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba dan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba. Sebaliknya, menurut Pindiharti (2011) aktiva pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan liabilitas pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menerapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sering kali digunakan untuk tujuan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan dan lain-lain (fungsi mengatur) yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari SAK. Di lain pihak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan, baik subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan, dikenakan pajak penghasilan dan untuk menghitung pajak penghasilan tersebut, subjek pajak yang bersangkutan berkewajiban

mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang disediakan oleh Instansi Pajak.

Pada umumnya, bentuk dan isi yang terdapat dalam SPT untuk kepentingan perpajakan hampir tidak berbeda jauh dengan bentuk dan isi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk kepentingan komersial. Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (KPPU), sedangkan Penghasilan Sebelum Pajak (PSP) dihitung berdasarkan SAK. Pajak penghasilan yang dihitung berbasis PKP yang sesungguhnya dibayar ke pemerintah, disebut sebagai PPh terutang (*taxable income*), sedangkan pajak penghasilan yang dihitung berbasis PSP disebut sebagai beban pajak penghasilan (*income tax expense*). Perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak, sepanjang menyangkut perbedaan temporer hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial, dalam akun pajak tangguhan (*deferred tax*) baik aktiva pajak tangguhan maupun liabilitas pajak tangguhan. PSAK No. 46 mewajibkan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*) atas “*future tax effects*” dengan menggunakan “*balance sheet liability method*” atau “*asset/liability method*”. Konsekuensi yang dimaksud dapat berupa penambahan nilai dasar pengenaan pajak di

masa yang akan datang, ataupun pengurang nilai dasar pengenaan pajak.

PSAK No. 46 (revisi 2010) menyatakan aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aktiva pajak tangguhan dapat disamakan seperti lebih bayar pajak, yang akan diganti di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Sementara itu, liabilitas pajak tangguhan dapat disamakan seperti kurang bayar pajak, yang akan dibayar di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Kenaikan neto aktiva pajak tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan, sebaliknya, kenaikan neto liabilitas pajak tangguhan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan. Beban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam merekayasa laporan keuangannya.

Nasution dan Setiawan (2007 dalam Ningsaptiti, 2010) dengan sampel perusahaan perbankan tidak menemukan adanya pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Sebaliknya, Nuryaman (2009) menemukan hubungan

signifikan antara ukuran perusahaan manufaktur dengan praktik manajemen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Mpaata dan Sartono (1970 dalam Santi, 2008 dalam Agusti dan Pramesti, 2009) mengatakan bahwa besaran perusahaan / skala perusahaan adalah ukuran perusahaan yang di tentukan dari jumlah total yang dimiliki perusahaan. Menurut Santi (2008 dalam Agusti, dkk., 2009), perusahaan berskala besar mempunyai insentif yang cukup besar untuk melakukan manajemen laba, karena salah satu penyebab utamanya adalah perusahaan besar harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau pemegang sahamnya. Selain itu, semakin besar perusahaan, semakin banyak estimasi dan penilaian yang perlu diterapkan untuk tiap jenis aktivitas perusahaan yang semakin banyak.

Pengaruh pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan dan ukuran perusahaan sangat erat dalam perusahaan melakukan manajemen laba yang berfungsi untuk memaksimalkan bonus yang mereka inginkan dan meminimalkan pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Pengakuan pajak tangguhan dapat membuat laba bersih berkurang maupun bertambah hal itu dikarenakan pengakuan beban pajak tangguhan. Pengakuan aktiva pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan didasarkan fakta adanya kemungkinan pembayaran pajak pada periode yang akan datang menjadi lebih besar maupun lebih kecil yang dapat dimanfaatkan manajemen untuk memanipulasi

jumlah dari laba bersihnya sehingga bisa memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dilakukanlah penelitian dengan judul tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah disusun sebagai berikut :

Apakah aktiva pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk menguji pengaruh aktiva pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh antara variabel-variabel yang dalam hal ini

adalah Aktiva pajak tangguhan, Liabilitas pajak tangguhan dan ukuran perusahaan, dan terhadap praktik manajemen laba.

2. Manfaat Praktek

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor untuk menambah wawasan mengenai pasar modal terutama mengenai aktiva pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dalam hal pengembangan teori di masa mendatang.

1.5 Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB 2: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijabarkan penelitian terdahulu, teori-teori yang melandasi dan mendukung penyusunan skripsi dan selain itu dalam bab ini juga memuat hipotesis yang diajukan dalam penelitian dan model penelitian yang digunakan.

BAB 3: Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, pengukuran data, metode pengumpulan data, populasi, teknik pengambilan sampel, dan sampel, serta teknik analisis data dan prosedur pengujian hipotesis.

BAB 4: Analisis dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari obyek penelitian, deskripsi data, analisis data dari objek yang diteliti serta pembahasan dari hasil analisis data.

BAB 5: Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian serta masukan untuk penelitian selanjutnya.